

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila. Pemerintah Orde Baru pada era tahun 1980-an menginginkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi di Indonesia sehingga pemerintah saat itu mensosialisasikan Rancangan Undang-Undang (RUU) No 5/1985 tentang pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila. Pada Tahun 1984 beredar desas-desus bahwa Presiden Soeharto akan mendorong adanya Asas Tunggal Pancasila, sebagai satu-satunya platform ideologi politik untuk seluruh partai dan lembaga politik di Indonesia. Keinginan Presiden Soeharto ini ditanggapi dengan sinis oleh sebagian besar tokoh Islam di Indonesia sehingga menimbulkan berbagai ketegangan dan konflik antara pemerintah dengan tokoh-tokoh islam.¹

Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984 merupakan salah satu kasus peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi pada Masa Orde Baru, yang dilakukan oleh aparat pemerintah terhadap warga Tanjung Priok. Tanjung Priok merupakan sebuah daerah di Jakarta tempat kapal-kapal berlabuh, termasuk salah satu daerah miskin dan kumuh. Daerah ini menjadi tempat orang-orang desa mencari penghidupan, supaya mereka dapat tetap hidup di kota Jakarta. Tempat ini penuh sesak oleh penduduk. Berdasarkan sensus

¹ Ricklefs, MC. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta; 2008) hal, 435.

kependudukan tahun 1984, yang dimana warganya kebanyakan bekerja sebagai kuli panggul Koja. Sebuah lokasi di mana Peristiwa Tanjung Priok terjadi merupakan daerah hunian kaum buruh galangan kapal, buruh-buruh pabrik, bangunan dan buruh-buruh harian yang dikenal dengan “Pekerja Serabutan”. Warga Tanjung Priok sangat terpengaruh oleh gejolak ekonomi dan mudah sekali tersulut berbagai isu. Daerah ini dihuni oleh berbagai golongan penduduk yang berbeda-beda budayanya, seperti Banten, Jawa Barat, Madura, Bugis, Sulawesi dan lain sebagainya yang sangat dipengaruhi oleh kultur Islam.²

Di daerah Tanjung Priok, Masjid merupakan barometer kehidupan, tempat berkumpulnya orang-orang tua dan anak-anak serta tempat melepas lelah dari kepenatan kerja di jalan-jalan dan lorong-lorong. Segala keruwetan masalah menjadi pusat pembicaraan dan omongan diantara para jama'ah Masjid. Pada pertengahan 1984, beredar isu tentang RUU Organisasi Sosial yang mengharuskan penerimaan Asas Tunggal Pancasila. Hal ini menimbulkan implikasi yang luas, di antara pengunjung Masjid di daerah ini, terdapat seorang muballigh terkenal bernama Amir Biki menyampaikan ceramah pada para jamaahnya dengan menjadikan masalah tersebut sebagai

²Al- Chaidar, *Bencana kaum muslimin di Indonesia 1980-2000 Mihnatul islam fi Indonesia*. /<http://www.sribd.com/doc/4248925/pembahasan-tanjung-priok>.

topik pembahasan, sebab rancangan undang-undang tersebut telah lama menjadi masalah yang kontroversial.³

Pada tanggal 7 September Tahun 1984, seorang Babinsa datang ke Musholah kecil bernama “Mushola As-Sa’adah” dan memerintahkan untuk mencabut pamflet yang berisikan tulisan mengenai problem yang dihadapi kaum Muslimin, dan disertai pengumuman tentang jadwal pengajian yang akan datang. Keesokan harinya tanggal 8 September 1984, Seorang oknum ABRI beragama katholik, Sersan Satu Hermanu, mendatangi Mushola As-Sa’adah untuk menyita pamflet berbau ‘Syara’. Namun tindakan Sersan Hermanu sangat menyinggung perasaan umat Islam. Ia masuk ke dalam Masjid tanpa melepas sepatu, menyiram dinding Mushola dengan air got, bahkan menginjak Al-Qur’an. Warga marah dan motor Hermanu dibakar. (kesaksian Abdul Qadir Djaelani)⁴

Alasan mengapa saya mengambil judul ini karna menurut saya judul ini menarik untuk dibahas. Pertama; Konflik Ulama Umara merupakan konflik yang terjadi cukup lama yang belum ada penyelesaian hukumnya. Kedua; konflik ini terjadi karena dilatar belakangi oleh pelecehan agama. Ketiga; adanya ketegangan dan sekat antara pemerintah dengan Islam

³ Al- Chaidar, *Bencana kaum muslimin di Indonesia 1980-2000 Mihnatul islam fi Indonesia*. /<http://www.sribd.com/doc/4248925/pembahasan-tanjung-priok>.

⁴ Al- Chaidar, *Bencana kaum muslimin di Indonesia 1980-2000 Mihnatul islam fi Indonesia*. /<http://www.sribd.com/doc/4248925/pembahasan-tanjung-priok>.

padahal Presiden Soeharto sendiri beragama Islam namun kebijakan-kebijakan yang Presiden Soeharto terapkan bertentangan dengan agama Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kondisi Dan Situasi Masyarakat Tanjung Priok Menjelang Terjadinya Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984?
2. Bagaimana Deskripsi Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984?
3. Bagaimana Dampak Dari peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk terwujudnya deskripsi yang dapat menjelaskan tentang :

1. Kondisi Dan Situasi Masyarakat Tanjung Priok Menjelang Terjadinya Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984.
2. Deskripsi Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984.
3. Dampak Dari Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984?

D. Kerangka Pemikiran

Menurut bahasa, kata ulama berasal dari bahasa Arab yaitu; “orang-orang yang mengerti, orang-orang yang berilmu, atau orang-orang yang berpengetahuan”. Jadi, kata ulama merupakan jamak dari *mufrad* (kata tunggal) ‘alim, artinya orang yang berilmu, sarjana, yang terpelajar, yang berpengetahuan atau ahli ilmu.⁵ Kata ‘alim itu sendiri merupakan *isim fa’il* dari kata kerja *alima*, yang artinya “ia telah mengerti” atau “ia telah mengetahui”.

Pada umumnya masyarakat Islam Indonesia mengartikan kata ulama sebagai “seorang yang berilmu”. Sedangkan ulama menurut istilah yaitu orang yang memiliki ilmu pengetahuan mengenai Al-Qur’an dan Al-Hadits menerapkan Al-Qur’an dan Al-Hadits dalam kehidupannya.

Menurut arti kata ulama di atas, bila kata tersebut tidak dihubungkan dengan kata lain, maka arti kata tersebut mempunyai arti yang sangat umum dan luas. Kata ulama meliputi semua orang yang berilmu, apa saja ilmunya, baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu lain. Konteks pengertian ulama berkaitan dengan orang yang menguasai ilmu pengetahuan, mencakup menguasai ilmu pengetahuan yang bersifat kekinian, seperti ilmu

⁵ A.W. Munawir, Kamus Arab-Indonesia (Surabaya : Pustaka Progressif Kapila, 6000), Hal. 99

pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan (Humaniora), serta teknologi.

Oleh karena itu, formulasi ulama ialah mereka yang mengetahui ilmu pengetahuan umum yang berangkat dari pengetahuan keagamaan atau kitab suci. Jadi, dalam pengertian yang umum, sebenarnya tidak ada garis pemisah antara ulama dan cendekiawan Muslim. Dengan demikian ulama merupakan orang yang memiliki pengetahuan luas tentang ayat-ayat Allah SWT, baik yang bersifat *Kawniyah* (fenomena alam) maupun yang bersifat *Qur'aniyah* (ajaran Al-Qur'an atau agama) yang mengantarkan manusia kepada pengetahuan tentang kebenaran Allah SWT, takwa, *istislam* (tunduk), dan *khasyyah* (takut).

Peristiwa merupakan sebuah kejadian atau tragedi yang terjadi yang terikat oleh waktu dan tempat. Sebuah peristiwa bisa terjadi atau terulang kembali dengan kejadian yang sama. Namun, memiliki waktu dan tempat yang berbeda.

Konflik merupakan sebuah masalah yang terjadi antara perseorangan atau kelompok yang dilatar belakangi oleh berbagai hal, yang disebabkan oleh perbedaan sudut pandang ataupun pendapat yang dapat memicu pertikaian atau keributan.

E. Metode Penelitian

Metode yang penulis terapkan dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan sejarah yang terdiri dari beberapa tahapan diantaranya, tahap heuristik, tahap keritik, tahap interpretasi, dan tahap historiografi.⁶

1. Tahap Heuristik

Tahap heuristik adalah tahapan mencari dan mengumpulkan data. Heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu *heuriskyen* yang artinya memperoleh. Dalam tahapan ini penulis mengumpulkan sumber-sumber yang mendukung dalam melakukan penelitian.⁷

Untuk memperoleh data yang diinginkan, pada tahapan ini penulis melakukan studi pustaka. Sumber tertulis dapat dilakukan dengan studi pustaka berupa dokumen. Dokumen-dokumen yang berhasil dihimpun merupakan data yang sangat berharga dokumen dapat menjadi dasar untuk menelusuri peristiwa-peristiwa sejarah yang telah terjadi pada masa lampau. Menurut sifatnya ada dua macam yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang dibuat pada saat peristiwa itu terjadi.

⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta; 2001) Hal, 91.

⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Hal, 91

Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang menggunakan sumber primer sebagai sumber utama.⁸

Adapun sumber yang didapat antara lain adalah ; Ki Suprioko, *Pendidikan Multikultural Dan Revitalisasi Hukum Adat Dalam Persepektif Sejarah* (Direktorat Jendral Kebudayaan; 2005), M. Bambang Pranowo, *Multi Dimensi Nasional* (Jakarta; Pustaka Alvabet, 2010), Abdullahi Ahmed Ahmed An-Na'im, *Islam Dan Negara Sekuler* (Mizan; Jakarta: 2007), Donal K. Emmerson, *Indonesia Beyond Suharto, Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi.* (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama), *Suara Amin Rais Suara Rakyat* (Gema Insani: 1998), Rimsky K. Judisseno. *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2005), Sugiono KS., dkk. *Pengetahuan Sosial Sejarah* (Grasindo, Jakarta: 2004), Nana Supriatna, *Sejarah* (Gerafindo Media Pratama, 2006), Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah 2* (PT Grafindo Media Pratama; Jakarta: 2009), Taufik Adi Susilo, *Soeharto Biografi Singkat 1921-2008*, A.M Fatwa, *Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok*, (Dharmapena Publising; Jakarta: 2005).

⁸ Kuntowijiyono, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Hal, 96.

2. Tahap Keritik

Setelah penulis melakukan tahapan pengumpulan sumber, maka langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah keritik sejarah (verifikasi data). Keritik sejarah dapat dibedakan menjadi dua yaitu; keritik ekstern dan keritik intern. Keritik ekstern dilakukan untuk mencari otentisitas data yaitu untuk mengetahui suatu sumber asli atau palsu. Sedangkan keritik intern dilakukan untuk mencari kredibilitas data yaitu untuk mengetahui suatu sumber benar atau salah.⁹

3. Tahap Interpretasi

Tahap yang selanjutnya adalah tahap interpretasi. Tahapan interpretasi yaitu tahapan penafsiran terhadap suatu peristiwa sejarah untuk memberikan makna serta menghidupkan kembali sumber sejarah. Penulis melakukan penafsiran terhadap sumber sejarah dan pada tahap ini sering kali terjadinya subyektifitas. Ada dua macam interpretasi yaitu analisis dan sintesis. Analisis yang berarti menguraikan, terkadang sumber mengandung beberapa kemungkinan. Sedangkan sintesis sendiri yaitu menyatukan, setelah diperoleh berbagai sumber kemudian penafsiran dari berbagai sumber tersebut diklompokkan menjadi satu dengan generalisasi konseptual.¹⁰

⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Hal, 97.

¹⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Hal, 97-98.

4. Tahap Historiografi

Adapun tahapan yang terakhir dalam penelitian ini adalah tahap historiografi. Tahapan historiografi adalah berupa penulisan sejarah. Tahapan historiografi adalah tahapan lanjutan dari interpretasi, karena setelah penulis melakukan interpretasi tentu menghasilkan kesimpulan-kesimpulan serta jawaban-jawaban tentang persoalan yang telah dirumuskan yang kemudian ditulis dalam sebuah karya tulis.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi pembahasan ini, terlebih dahulu penulis menguraikan sistematika pembahasan kedalam beberapa sub. Setiap bab terdiri dari sub bab, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua Situasi Dan Kondisi Masyarakat Tanjung Priok Menjelang Terjadinya Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984, Meliputi

¹¹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Hal, 98.

Kehidupan Sosial Keagamaan, Keadaan Sosial Politik Dan Keadaan Ekonomi Dan Budaya.

Bab Ketiga Deskripsi Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984, Meliputi Latar Belakang Terjadinya Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984 Dan Kronologi Terjadinya Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984.

Bab Keempat Dampak Dari Terjadinya Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984, Meliputi Bidang Keagamaan, Bidang Sosial Politik Dan Ekonomi Dan Bidang Penegakan Hukum Di Indonesia.

Bab Kelima Penutup, Meliputi Kesimpulan Dan Saran.